

KRISIS EKONOMI DAN DAMPAKNYA PADA KUALITAS KELUARGA

Oleh : Prijono Tjiptoherijanto

PENDAHULUAN

Setelah pertumbuhan yang menggembirakan rata-rata di atas 7 persen per tahun sampai dengan awal 1997, sejak bulan Juli tahun 1997 Indonesia mengalami krisis perekonomian yang demikian berat. Sedemikian berat, sehingga dalam sekejap mampu meruntuhkan apa yang selama tiga puluh tahun terakhir ini telah dibangun dengan susah payah.

Krisis ekonomi tersebut diawali dengan terjadinya krisis keuangan sebagai akibat penyesuaian mata uang negara-negara kawasan Asia Tenggara, termasuk rupiah terhadap dollar Amerika. Banyak pakar memperkirakan bahwa krisis tersebut bersifat sementara dan beberapa negara di kawasan ini akan mampu mengatasi krisis dalam waktu cepat, sekaligus membangun kembali perekonomian mereka dengan lebih baik. Kenyataan menunjukkan, beberapa negara, seperti Malaysia dan Korea Selatan memang mampu bangkit. Namun beberapa negara lagi, terutama Indonesia, masih harus bekerja keras mencari langkah-langkah strategis mengatasi krisis

yang makin hari makin tampak semakin memburuk ini.

Krisis yang terjadi dewasa ini bukan hanya disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi saja, namun merupakan gabungan antara krisis ekonomi, politik dan kepercayaan. Kondisi tersebut menjadi penyebab lumpuhnya sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus memicu berkembang berbagai permasalahan sosial. Nilai tukar rupiah yang terus menurun terhadap dollar Amerika mempengaruhi kemampuan pengembalian hutang luar negeri dan upaya ekspansi usaha nasional. Bukan itu saja, upaya

pemulihan perekonomian dan upaya menghimpun dana melalui peningkatan suku bunga ternyata malah menyebabkan usaha kecil dana menengah yang ada terancam gulung tikar. Bahkan banyak diantaranya pada saat ini sudah mengalami hal tersebut dan yang lain akan segera menyusul. Sementara itu terjadi pula peningkatan harga kebutuhan pokok dan harga barang-barang konsumsi lainnya. Angka inflasi membubung tinggi. Permasalahan ini menjadi berat karena dampaknya langsung dirasakan oleh penduduk yang sebagian besar masih tergolong miskin. Akibatnya, lembaga terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga, mengalami guncangan hingga harus melakukan berbagai penyesuaian baik dalam bentuk pengurangan pemenuhan keperluan sehari-hari ataupun bahkan terpaksa berpisah karena masing-masing anggota harus berusaha di lain tempat atau di luar kota sekedar untuk mempertahankan kehidupan yang layak.

DAMPAK KRISIS

Meminjam istilah kedokteran, krisis diartikan sebagai penyakit yang diderita oleh pasien dan dapat berlangsung lama serta semakin lama semakin parah, hingga akhirnya mencapai puncaknya. Situasi puncak ini yang disebut sebagai krisis. Pada proses selanjutnya menjurus ke dua arah, yaitu: meninggal atau sembuh. Meskipun menjadi sembuh, masih

diperlukan waktu yang cukup lama untuk pulih seperti sediakala. Apabila dihu-bungkan dengan masyarakat, maka krisis yang terjadi tidak akan menyebabkan *matinya* suatu masyarakat. Paling buruk adalah terjadinya *set back* atau kemunduran, yang memerlukan berbagai upaya strategis untuk menyembuhkan kondisi masyarakat bersangkutan kepada keadaan semula. Dan upaya ini memerlukan kesabaran serta konsistensi penanganan.

Krisis ekonomi dan moneter yang dialami saat ini memang menyebabkan berbagai kondisi yang kurang menguntungkan, khususnya terhadap kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Beberapa keadaan yang kurang menguntungkan dan patut mendapat perhatian tersebut antara lain :

Ketenagakerjaan

Seiring dengan penurunan laju pertumbuhan ekonomi hingga nol persen atau bahkan diperkirakan mencapai pertumbuhan yang negatif atau minus 10 persen, maka di berbagai bidang usaha telah terjadi perampangan/ bangkrutnya tempat usaha dan tidak berkembangnya investasi usaha baru. Tuntutan efektivitas dan efisiensi berbagai bidang usaha menyebabkan peningkatan pengangguran, khususnya karena terjadi pemutusan hubungan kerja. BPS pada tahun 1995 mencatat sekitar 11,1 persen tingkat pengangguran terbuka di

daerah perkotaan dan 5,3 persen di daerah perdesaan. Sudah jelas angka ini makin meningkat karena berbagai kondisi yang berkembang dewasa ini. Sementara itu telah pula terjadi pemulangan TKI dari beberapa negara penerima, baik karena kontrak kerja telah habis maupun sebagai dampak resesi global yang juga melanda perekonomian negara-negara tujuan TKI tersebut. Seberapa besar pengangguran pada saat ini belum ada catatan resmi, namun diperkirakan telah mencapai 14 juta orang lebih.

Apabila angka tersebut di atas benar, maka sebenarnya yang terkena dampak akan lebih besar lagi. Misalnya, diperhitungkan masing-masing penganggur menanggung 2-3 orang anggota keluarga lainnya, maka terdapat sekitar 40-50 juta orang yang terkena dampak krisis yang masih terus berlangsung saat ini.

Kesehatan

Sejak awal terjadinya krisis moneter dan diikuti oleh tingginya inflasi yang bergerak ke arah dua digit atau bahkan diperkirakan bisa mencapai 100 persen untuk tahun 1998 ini, memberikan dampak yang teramat besar terhadap kesehatan masyarakat. Terutama karena terjadinya peningkatan harga bahan pangan dan obat-obatan. Status kesehatan dan gizi ibu dan anak serta pelayanan kesehatan diperkira-

kan menurun. Sementara angka kesakitan/ morbiditas akan meningkat mengikuti peningkatan biaya konsumsi, pelayanan kesehatan, harga obat dan biaya produksi obat. Besarnya komponen impor dalam produksi obat-obatan telah menyebabkan harga obat melonjak tinggi. Termasuk obat generik. Bahkan Departemen Kesehatan pada awal April 1998 telah mengisyaratkan akan terjadinya kenaikan harga obat generik hingga 30 persen.

Bersamaan dengan terjadinya krisis, kekeringan juga melanda di hampir seluruh daerah di Indonesia dan mempengaruhi kemampuan

Tahun 1998 diperkirakan tambahan pengangguran sekitar 1,1 juta orang untuk seluruh sektor

Djuhari Wirakartakusumah, 1998

HAKTI - DHARMA - WASPADA

lingkungan dalam produksi pertanian, termasuk produksi peternakan dan perikanan. Di beberapa daerah seperti Kalimantan dan Sumatera, kekeringan yang berkepanjangan mengakibatkan kebakaran hutan yang hebat dan menimbulkan polusi udara yang menyesakkan. Secara langsung polusi asap ini mengganggu pernafasan, kesehatan mata dan ibu hamil serta anak-anak. Gangguan pernafasan ini dapat dilihat dari meningkatnya penderita

ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut), terutama pada anak-anak.

Untuk menanggulangi krisis ekonomi, beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah seperti penyesuaian harga terhadap beberapa barang kebutuhan pokok antara lain beras, gula, minyak, dan beberapa kebutuhan lain, seperti listrik, air, transportasi, dan lain-lain, justru semakin menurunkan kemampuan daya beli masyarakat yang memang sudah sangat rendah tersebut. Pada masa pra krisis saja, masyarakat golongan rendah harus hidup secara pas-pasan. Bahkan banyak diantaranya setiap bulan bersaldo kurang. Dengan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang mencapai 100 persen sampai dengan 300 persen tersebut, keluarga-keluarga dari golongan berpendapatan rendah itu tidak tahu lagi dari mana bisa mereka mendapatkan tambahan penghasilan. Padahal lebih dari separuh penduduk Indonesia merupakan masyarakat golongan paling rendah. Menurut data BPS 1996, persentase masyarakat golongan atas (pengeluaran per bulan Rp. 150.000,- ke atas) sebanyak 6,46 persen, masyarakat golongan menengah (pengeluaran per bulan Rp 100.000,- s/d Rp 149.999,-) sebesar 9,39 persen, masyarakat golongan bawah (pengeluaran per bulan Rp 60.000,- s/d Rp 99.999,-) sekitar 24,54 persen dan masyarakat golongan rendah (pengeluaran per bulan kurang dari Rp 15.000,- atau s/d Rp 59.999,-)

sejumlah 59,61 persen. Penurunan daya beli tersebut membawa pengaruh terhadap kualitas dan kuantitas konsumsi makanan dan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Penurunan kuantitas dan kualitas konsumsi secara langsung menyebabkan penurunan produktivitas penduduk dan keluarga. Secara tidak langsung akan mempengaruhi bidang pendidikan dan sosial, karena alokasi dana yang seharusnya diperuntukkan bagi bidang-bidang ini, harus dialokasikan bagi pemenuhan kebutuhan konsumsi yang lebih dianggap sangat diperlukan.

Kemiskinan

Pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin telah mencapai 11,3 persen dari seluruh penduduk atau sekitar 22,5 juta orang. Dengan meningkatnya harga barang konsumsi lebih dari 80 persen dan inflasi yang tinggi dan diperkirakan bisa mencapai 100 persen, akan menyebabkan jumlah penduduk miskin akan semakin meningkat 2,5 kali lipat atau diperkirakan menjadi sekitar 60 juta orang (lihat KONTAN, 1998). Data BPS terbaru yang dipublikasikan pada tanggal 2 Juli 1998 menunjukkan jumlah penduduk miskin telah mencapai sekitar 39,1 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia atau sebanyak 79,4 juta jiwa. Dampak sosial dari kemiskinan ini tentunya sangat merugikan. Meningkatnya penduduk miskin di kota-kota besar menyebab-

kan semakin berkembangnya kawasan kumuh. Remaja dan pemuda putus sekolah semakin membengkak jumlahnya. Belum lagi jumlah remaja dan pemuda yang menunda untuk melanjutkan sekolah akibat ketidakmampuan keluarga mereka membayar uang sekolah dan berbagai keperluan sekolah seperti alat-alat tulis menulis dan buku bacaan. Keadaan seperti ini akan berlangsung sampai akhir tahun 1998 atau bahkan lebih. Sementara lapangan kerja yang ada tidak mampu menampung mereka yang ingin masuk lapangan kerja. Pada gilirannya, akan terjadi peningkatan kriminalitas yang membuat hidup masyarakat menjadi tidak nyaman dan kurang aman.

Putus sekolah

Krisis moneter yang diperparah oleh kekeringan berkepanjangan telah mengganggu keseimbangan dan stabilitas ekonomi tidak hanya menyebabkan penurunan daya beli termasuk daya beli makanan, pelayanan kesehatan dan obat-obatan, tetapi juga daya beli terhadap jasa-jasa pendidikan. Besarnya **drop out** dan angka tidak melanjutkan sekolah sebagai dampak krisis yang terjadi, akan sangat merugikan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Oleh karenanya, program

pendidikan harus tetap mendapat perhatian seiring dengan langkah-langkah perbaikan ekonomi nasional. Langkah apa pun harus diambil untuk mempertahankan agar anak tetap bersekolah, karena sekolah merupakan lingkungan konstruktif yang membentuk dan memberikan pelajaran serta bimbingan, selain di rumah. Kampanye Wajib Belajar Pendidikan Dasar dengan logo "Aku Anak Sekolah" yang dicanangkan pada tanggal 29 Juni 1998 merupakan salah satu langkah yang

Di Universitas Gajahmada misalnya, 460 mahasiswa meminta penundaan pembayaran SPP dan sekitar 4000 orang lainnya meminta cuti atau tidak memberi kabar kelanjutan kuliahnya

Kompas, 18 Mei 1998

tepat.

Prioritas utama harus diberikan pada anak sekolah SD. Hal ini penting karena mereka yang mendaftar ke SLTP biasanya telah menyelesaikan masalah finansial yang ada. Oleh karenanya, kebanyakan anak-anak yang telah duduk di SLTP akan cenderung bertahan dan berusaha menyelesaikan sekolahnya. Karena hampir seluruh anak usia SD telah bersekolah, maka angka tidak melanjutkan sekolah sebesar 30 persen tersebut, mencerminkan mereka yang benar-benar rentan terhadap permasalahan sosial ekonomi. Angka ini diperkirakan akan berkembang

menjadi sekitar 40 persen (Irwanto, 1998). Keadaan seperti ini juga akan terjadi pada anak-anak dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Data Pusat Informasi dan Dokumentasi Depdikbud, 1997, terlihat pada tahun 1995/1996 jumlah total anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah adalah sebesar 17,5 juta dari 52,7 juta anak usia sekolah pada kelompok tersebut. Kondisi ini terjadi pada saat persentase kemiskinan telah mencapai 11,5 persen dari seluruh penduduk. Dengan perkiraan bahwa pada saat ini telah terjadi pemiskinan akibat krisis dan peningkatan harga bahan kebutuhan, maka besarnya angka anak yang tidak bisa bersekolah akan semakin meningkat pula. Jika terjadi penurunan angka partisipasi anak sekolah usia 7-18 tahun (SD, SLTP dan SLTA) sebesar 10 persen saja pada tahun 1998/1999, maka akan ada tambahan sekitar 7 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak dapat bersekolah. Dari jumlah tersebut diperkirakan 5 juta diantaranya berusia 7-15 tahun atau merupakan anak yang mendapat prioritas Wadikdas (Wajib Pendidikan dasar).

Kualitas keluarga

Keluarga yang mengalami tekanan ekonomi akan mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi terhadap insiden kekerasan domestik (Geles, 1994 dalam Irwanto, 1998). Insiden kekerasan domestik di sini bukan hanya berbentuk kekerasan fisik semata, akan tetapi juga

kekerasan berdampak psikis bagi para anggota keluarga lainnya. Dalam bentuk yang paling sederhana adalah berupa umpatan atau perkataan yang tidak menyenangkan karena kesal, yang mungkin dalam keadaan "biasa" hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Ketidakpuasan dan tekanan ekonomi menyebabkan pengelola keuangan akan mengalami *stress*. Oleh karenanya, kesalahan kecil saja yang dibuat oleh salah seorang anggota keluarganya akan menjadi pencetus kekerasan domestik tersebut. Perlu pula ditekankan bahwa mereka yang mempunyai resiko tinggi terhadap perlakuan tersebut adalah mereka yang berada dalam kondisi sulit, seperti anak cacat, baik mental maupun fisik, serta bayi. Karena dengan hanya mengabaikan atau membiarkan serta melalaikan saja, tanpa memperlakukan dengan kekerasan, telah dapat mengakibatkan kemunduran perkembangan anak-anak yang bersangkutan.


Sedangkan dari segi fisik, kualitas para anggota keluarga cenderung menurun. Khususnya karena penurunan kesehatan dan gizi keluarga. Para keluarga harus mempunyai pengetahuan tentang bagaimana membuat pola makanan seimbang dengan makanan pengganti yang mungkin masih terbeli. Karena terjadi peningkatan harga yang sangat tinggi terhadap beberapa barang kebutuhan pokok seperti daging, telur dan sayur-mayur. Memang dampak kenaikan

harga bahan kebutuhan pokok tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap keluarga yang berkecukupan. Namun bagi keluarga dengan tingkat ekonomi rendah akan sangat memberatkan.

PENUTUP

Krisis yang terjadi akhir-akhir ini dan masih akan berlangsung sepanjang tahun 1998 serta awal tahun 1999 memberi pengaruh buruk bagi hampir seluruh penduduk di Indonesia. Terlebih lagi apabila ada salah satu anggota keluarga yang terkena PHK dan merupakan tulang punggung perekonomian keluarga. Kualitas keluarga menjadi terancam. Dengan demikian permasalahan yang dihadapi bukan sekedar PHK saja, akan tetapi dampak krisis ekonomi menjadi sangat berat dan dapat berkembang menjadi permasalahan sosial, seperti terjadinya proses pemiskinan, *drop-out*, kriminalitas, pelacuran dan

berbagai permasalahan sosial-kemasyarakatan lainnya.

Krisis akan menjadi sangat parah apabila telah menyentuh pemenuhan keperluan rumah tangga, yakni kebutuhan pangan. Oleh karenanya, diperlukan adanya program bantuan terhadap keluarga dan rumah tangga golongan bawah dan rendah. Bantuan tersebut dapat berbentuk bantuan pangan, obat-obatan, makanan tambahan bagi anak, khususnya susu bagi balita, dan bantuan untuk meneruskan sekolah bagi anak-anak usia sekolah. Pemerintah bersama dengan masyarakat juga berkewajiban membuka berbagai kesempatan kerja dan usaha baru, yang bisa berbentuk proyek padat karya namun bersifat produktif, sehingga lebih bersifat berkesinambungan. Bukan sekedar kegiatan yang bersifat sementara, sumir atau bahkan terkesan sebagai "pameran" kedermawanan semata-mata. 

kegiatan sosial
komunitas.

Kita akan menjadi bagian dari
kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

kegiatan sosial.

